

COLLABORATIVE GOVERNANCE PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI KOTA PALEMBANG

Alvita Cindy Wijaya

NPP. 31.0213

Asdaf Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: alvitacindyw@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Merintha Suryapusita, S.AP, M.KP

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP) *The Non-Cash Food Assistance Program in Palembang City as a form of poverty alleviation efforts that reaps many pros and cons in its implementation. **Purpose** To describe collaborative governance in the Non-Cash Food Assistance program to alleviate poverty in Palembang City and the supporting and inhibiting factors in collaborative governance in the Non-Cash Food Assistance program in Palembang City. **Method:** This study qualitative method with data collection techniques in this study were documentation, observation, and interviews. **Results:** showed that there are two supporting factors, namely the cooperation of each stakeholder and the encouragement of leaders to help the success of the Non-Cash Food Assistance program to reduce poverty in Palembang City. There are two inhibiting factors, namely inadequate infrastructure and data collection that has not been implemented optimally to help the success of the Non-Cash Food Assistance program to reduce poverty in Palembang City. **Conclusion:** every stakeholder works together to help the success of the Non-Cash Food Assistance program to reduce poverty in Palembang City. There are clear regulations to help the success of the Non-Cash Food Assistance program to alleviate poverty in Palembang City, namely Presidential Regulation No. 63/2017 on the distribution of social assistance in cash. Good management.*

Keywords: *Non-Cash Food Assistance, Evaluation, Poverty*

ABSTRAK

PERMASALAHAN (GAP): Program Bantuan Pangan Tunai di Kota Palembang sebagai bentuk upaya pengentasan kemiskinan yang menuai banyak pro kontra dalam pelaksanaannya. **Tujuan:** untuk mendeskripsikan *collaborative governance* dalam program Bantuan Pangan Non Tunai untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Palembang dan faktor pendukung dan penghambat dalam *collaborative governance* dalam program Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Palembang. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan dokumentasi, observasi, dan wawancara. **Hasil/Temuan:** terdapat adanya dua faktor pendukung yaitu kerja sama setiap pemangku kepentingan dan dorongan dari pemimpin untuk membantu keberhasilan program Bantuan Pangan Non Tunai untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Palembang. Terdapat dua faktor penghambat yaitu Sarana Prasarana yang belum memadai dan pendataan yang belum dilaksanakan dengan maksimal untuk membantu keberhasilan program Bantuan Pangan Non Tunai untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Palembang. **Kesimpulan:** setiap

pemangku kepentingan saling bekerja sama untuk membantu keberhasilan dalam program Bantuan Pangan Non Tunai untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Palembang. Terdapat peraturan yang jelas untuk membantu keberhasilan program Bantuan Pangan Non Tunai untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Palembang yaitu Peraturan Presiden RI No 63 tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara tunai. Manajemen yang baik untuk melaksanakan evaluasi berkala dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Palembang.

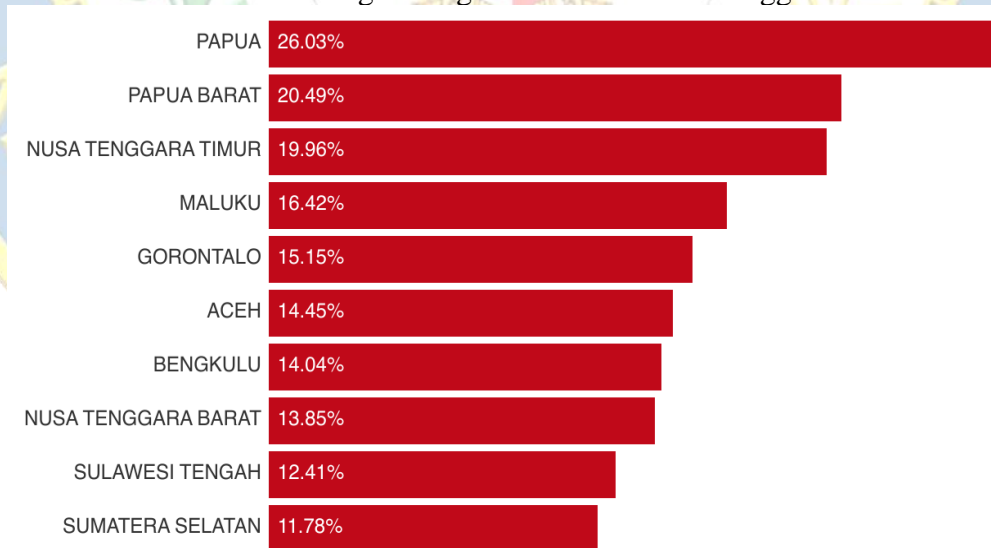
Kata kunci: Bantuan Pangan Non Tunai, Evaluasi, Kemiskinan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan suatu situasi yang mengalami keterbatasan dalam mencukupi kebutuhan dasar dan kesejahteraan hidup masyarakat (Pratiwi et al., 2022). Kemiskinan masih menjadi masalah yang terus berlangsung diberbagai negara diseluruh dunia termasuk negara-negara berkembang. Kemiskinan memberikan dampak terhadap pembangunan negara. Beberapa masalah yang berhubungan dengan kemiskinan seperti meningkatnya angka pengangguran, peningkatan inflasi, rendahnya kualitas pendidikan, dan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Hubungan kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi yaitu tujuan dari pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Maulana et al., 2022). Kemiskinan sudah menjadi masalah di Indonesia sejak zaman dahulu. Sejak awal kemerdekaan Indonesia hingga saat ini kemiskinan masih belum dapat teratasi secara menyeluruh. Masih banyak terdapat daerah yang kondisi kemiskinan masyarakatannya sangat tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa terdapat 10 provinsi yang tingkat kemiskinannya di atas 10%.

Gambar 1 Provinsi dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi Tahun 2023



Sumber: BPS, 2023

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023 pada

Provinsi Sumatera Selatan menduduki peringkat 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi pada tahun 2023. Jumlah penduduk miskin di Sumatera Selatan mencapai 11,78% dari total jumlah penduduknya. Hal tersebut dilihat berdasarkan masyarakat ekonomi bawah yang menjadi sampel data kemiskinan BPS setiap tahunnya, seperti garis kemiskinan per kapita: Rp 520.754 per-bulan.

Gambar 2 Jumlah Penduduk Miskin Kota Palembang Per-Tahun



Sumber: BPS, 2023

Gambar 1.2 jumlah penduduk Kota Palembang pada tahun 2023 seperti pada gambar 1.2 diproyeksikan sebanyak 1.707.996 jiwa dan jumlah penduduk miskin di Kota Palembang pada Maret 2021 mencapai 194.120 orang atau 11,34 % dari total penduduk. Angka ini meningkat sebesar 11.510 orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2020 yang sebesar 182.610 orang atau 10,89%. Penduduk miskin merupakan penduduk dengan rata-rata pengeluaran perkapita dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan menunjukkan nilai pengeluaran secara minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan dalam upaya menanggulangi kemiskinan, pemerintah memiliki berbagai upaya agar jumlah kemiskinan berkurang, salah satunya adalah Program BPNT. Program BPNT adalah singkatan dari Bantuan Pangan Non Tunai. Program ini merupakan bantuan sosial dari pemerintah yang diberikan dalam bentuk non tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang termasuk dalam kategori masyarakat miskin atau rentan. Masyarakat sangat membutuhkan Bantuan pangan non tunai diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar (OJK, 2019). Kehadiran program ini diharapkan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan.

Integrasi *multi-stakeholder* adalah suatu proses esensial yang melibatkan kerjasama dan koordinasi antara beragam pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program

atau kebijakan, sebagaimana yang diimplementasikan dalam Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Integrasi *multi-stakeholder* menjadi dasar fundamental yang harus dijaga untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dan berkesinambungan dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (Kuijala, 2022). Pelaksanaan program BPNT di Kota Palembang menghadapi berbagai masalah empiris yang berkaitan dengan *collaborative governance*. Salah satu masalah utama adalah kurangnya koordinasi yang efektif antara berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan BPNT. Kurangnya komunikasi dan sinergi antara lembaga-lembaga tersebut menyebabkan tumpang tindih dan ketidakefisienan dalam pelaksanaan program. Solusi yang dapat diterapkan adalah meningkatkan mekanisme komunikasi dan koordinasi melalui pembentukan forum reguler yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Selain itu, infrastruktur teknologi yang tidak merata, terutama di daerah-daerah pinggiran kota, menghambat distribusi kartu elektronik dan akses ke e-warong. Banyak daerah di Palembang yang masih mengalami keterbatasan akses internet dan fasilitas pendukung lainnya, sehingga menghambat penerapan teknologi dalam program BPNT. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya investasi dalam infrastruktur teknologi, termasuk jaringan internet dan perangkat pendukung di e-warong.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks tingkat *collaborative governance*. Penelitian Rahmah Yusrafitri dan Suci pada tahun 2022 yang berjudul “Sinergitas *Stakeholders* dalam Penanggulangan Kemiskinan di Masa Pandemi Covid-19.” Penelitian ini lebih fokus pada bagaimana sinergi antara *stakeholders* dapat meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan di tengah pandemi COVID-19. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada *collaborative governance* program BPNT untuk menanggulangi kemiskinan (Rahmah Yusrafitri, 2022).

Penelitian Eko Budi Santoso, Sutikno, Vely Kukinul Siswanto, dan Yuni Setyaningsih pada tahun 2023 yang berjudul “Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Tuban Melalui Integrasi Program Antar OPD.” Penelitian ini berfokus pada strategi penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten melalui integrasi program antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada *collaborative governance* dalam implementasi program BPNT untuk menanggulangi kemiskinan (Eko Budi et al., 2023).

Penelitian Rutiana Dwi Wahyunengseh, Sri Hastjarjo, dan Didik Gunawan Suharto pada tahun 2020 yang berjudul “Diseminasi Komponen *Collaborative Governance* Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Penanggulangan Kemiskinan.” Peneliti ini lebih berkaitan dengan aspek diseminasi komponen *collaborative governance* dalam proses perumusan peraturan terkait penanggulangan kemiskinan di tingkat kota. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada *collaborative governance* program BPNT untuk menanggulangi kemiskinan (Rutiana Dwi, 2020).

Penelitian Franky Tielung, Nurliah Nurdin, dan Neneng Sri pada tahun 2023 yang berjudul “*Collaborative Governance* Penanganan Bagi Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Melalui Rumah Aman Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.” Peneliti ini berfokus pada kriteria dan persyaratan untuk rumah aman bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dengan perspektif dari korban dan model kolaborasi antara pemerintah yang menangani kasus tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada *collaborative governance* program BPNT untuk menanggulangi kemiskinan (Franky Tielung dkk, 2023).

Penelitian Afif Syarifudin Yahya, Dedi Kusmana, Ismunarta Ismunarta, dan Rahmawati Sururama pada tahun 2024 yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Penanganan Kemacetan di Kota Surabaya

Provinsi Jawa Timur.” Peneliti ini berfokus untuk menganalisa kemampuan pelaksanaan collaborative governance mengurangi tingkat kemacetan di Kota Surabaya berdasarkan empat dimensi dari teori Ansell dan Gash. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada collaborative governance program BPNT untuk menanggulangi kemiskinan (Afif Syarifudin dkk, 2024).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni proses *collaborative governance* terhadap program Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugasnya dan menyelenggarakan sistem pemerintahan daerah dengan konsep *collaborative governance*. Metodenya yang digunakan menggunakan kualitatif. Penelitian sebelumnya meneliti tentang bagaimana sinergi antara stakeholders dapat meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan di tengah pandemi COVID-19 (Rahmah Yusrafitri, 2022), strategi penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten melalui integrasi program antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (Eko Budi et al, 2023), serta aspek diseminasi komponen *collaborative governance* dalam proses perumusan peraturan terkait penanggulangan kemiskinan di tingkat kota (Rutiana Dwi,et al, 2020). Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada aspek *collaborative governance* program BPNT untuk menanggulangi kemiskinan. Tujuan penyusunan penelitian sebelumnya adalah untuk memudahkan penulis dalam mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis nantinya. Terdapat tiga penelitian tersebut ditemukan persamaan dan perbedaan. Persamaan terdapat pada pada fokus penelitian yang diteliti, yaitu semua penelitian memiliki fokus yang kuat pada penanggulangan kemiskinan. Semua penelitian melibatkan berbagai pihak atau pemangku kepentingan (stakeholders) dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Semua penelitian membahas bagaimana melibatkan berbagai pihak dalam penanggulangan kemiskinan. Sedangkan perbedaannya pada ketiga penelitian tersebut belum ada yang berfokuskan pada *collaborative governance* program BPNT untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Palembang.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana *collaborative governance* dalam program BPNT untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Palembang.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis data yang diperoleh dari observasi, dokumentasi, dan wawancara (Saleh S., 2017). Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam melaksanakan pengamatan adalah menggunakan metode deskriptif. Menurut Creswell (2018) penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang diperlukan untuk mengeksplorasi dan memahami definisi apa yang berkaitan dengan masalah sosial dan kemanusiaan yang dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok. Pendekatan ini menjelaskan bagaimana perkembangan pola perilaku manusia sejak dahulu dengan pengamatan masyarakat yang dimana keterlibatannya menjadi kunci penting. Sedangkan menurut Patricia (2017) penelitian kualitatif merupakan rancangan studi wawancara dengan menggunakan metode pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan fleksibel dan terbuka untuk memperoleh isu – isu yang dilihat penting dengan pengalaman langsung oleh informan (Sugiyono, 2013). Penelitian ini memiliki keunggulan yaitu pengumpulan data yang menggunakan berbagai macam deskripsi. Penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Disebut Penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini lebih

menekankan analisisnya pada hubungan penyimpulan deduktif dan induktif, serta pada analisa terdapat dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah (Salim, Syahrum., 2011). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif karena data-data yang disajikan berupa pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan bagaimana *collaborative governance* pada Program BPNT dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kota Palembang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis *collaborative governance* pada pelaksanaan BPNT dalam penanganan kemiskinan di Kota Palembang yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Collaborative governance dalam program BPNT untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Palembang

Koordinasi antara pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial, dengan pemerintah daerah Kota Palembang merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan BPNT. Kementerian Sosial bertanggung jawab atas kebijakan nasional dan pengawasan umum program, sementara Dinas Sosial Kota Palembang menangani implementasi di tingkat lokal. Mereka bekerja sama dalam perencanaan, distribusi kartu elektronik, pemantauan, dan evaluasi program. Kementerian Sosial menyediakan pedoman umum dan juknis yang dijadikan acuan oleh Dinas Sosial untuk memastikan program berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *Collaborative Governance* untuk Program BPNT di Kota Palembang tidak hanya memberikan gambaran tentang kemajuan program secara real-time, tetapi juga mengarah pada upaya perbaikan berkelanjutan, pembelajaran kolektif, dan peningkatan akuntabilitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan akhir, yaitu mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan. Hasilnya juga memfasilitasi pembelajaran bersama antara pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan pihak lainnya. Dengan membagikan dan menganalisis data yang diperoleh dari hasil sementara, mereka dapat memahami lebih baik apa yang berhasil dan apa yang tidak, serta mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diterapkan di masa depan.

3.2. Faktor pendukung dan penghambat collaborative governance dalam program Bantuan Pangan Non Tunai untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Palembang

Berdasarkan faktor pendukung collaborative governance dalam program bantuan pangan non tunai untuk menanggulangi kemiskinan dapat diketahui jika faktor pendukungnya berkaitan dengan kerja sama setiap pemangku kepentingan dan dorongan dari pimpinan.

1. Kerja sama setiap pemangku kepentingan

Sesuai dengan hasil wawancara dapat diketahui jika faktor pendukung ini bisa memperoleh keberhasilan jika masing-masing pihak juga saling melakukan kerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Hal ini dinilai penting sebab tanpa adanya kerja sama maka setiap kegiatan yang dilaksanakan tidak dapat terlaksana dengan baik. Pemberian bantuan pangan non tunai memberikan kemudahan kepada masyarakat sehingga masyarakat diharapkan bisa terbantu dengan pemberian bantuan ini.

2. Dorongan dari pemimpin

Sesuai dengan hasil wawancara dapat diketahui jika faktor pendukung ini menjadi dorongan bagi setiap pihak untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Dorongan yang diberikan pemimpin menjadi motivasi pegawai agar dapat membantu kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program bantuan pangan non tunai.

Berdasarkan faktor penghambat collaborative governance dalam program bantuan pangan non tunai untuk menanggulangi kemiskinan dapat diketahui jika faktor penghambatnya berkaitan dengan

sarana dan prasarana yang belum cukup memadai dan pendataan yang belum dilaksanakan dengan maksimal sehingga berpengaruh terhadap pihak-pihak yang menerima data.

1. Sarana prasarana yang belum memadai

Dari hasil wawancara dapat diketahui jika setiap sarana dan prasarana pasti mempunyai kegunaan. Sarana dan prasarana mampu menciptakan perubahan sehingga membantu keberhasilan program. Sesuai dengan hasil wawancara dapat diketahui jika kurangnya sarana dan prasarana mempengaruhi keberhasilan program.

2. Pendataan yang belum dilaksanakan dengan maksimal

Sesuai dengan hasil wawancara dapat diketahui jika kedua faktor penghambat ini saling memberikan pengaruh yang besar untuk keberhasilan program Bantuan Pangan Non Tunai untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Palembang sehingga harus diatasi dengan cepat.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, Berdasarkan analisa yang telah dilakukan oleh penulis penjelasan sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan mengenai Collaborative Governance Dalam Percepatan Penurunan Kemiskinan di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan faktor-faktor pendukung dan penghambat yang ditemukan oleh penulis. Berdasarkan faktor pendukung collaborative governance dalam program bantuan pangan non tunai untuk menanggulangi kemiskinan dapat diketahui jika faktor pendukungnya berkaitan dengan kerja sama setiap pemangku kepentingan dan dorongan dari pimpinan. Kerja sama setiap pemangku kepentingan. Hal ini dinilai penting sebab tanpa adanya kerja sama maka setiap kegiatan yang dilaksanakan tidak dapat terlaksana dengan baik. Pemberian bantuan pangan non tunai memberikan kemudahan kepada masyarakat sehingga masyarakat diharapkan bisa terbantu dengan pemberian bantuan ini. Dorongan dari pemimpin. Dorongan yang diberikan pemimpin menjadi motivasi pegawai agar dapat membantu kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program bantuan pangan non tunai. Berdasarkan faktor penghambat collaborative governance dalam program bantuan pangan non tunai untuk menanggulangi kemiskinan dapat diketahui jika faktor penghambatnya berkaitan dengan sarana dan prasarana yang belum cukup memadai dan pendataan yang belum dilaksanakan dengan maksimal sehingga berpengaruh terhadap pihak-pihak yang menerima data. Sarana prasarana yang belum memadai. Pendataan yang belum dilaksanakan dengan maksimal. Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya seperti yang diteliti oleh Rahma Yusrafitri (Rahmah dkk, 2022) yang dimana dalam penelitian tersebut kunci keberhasilan dalam pelaksanaan kolaborasi tersebut ialah kerjasama dan komunikasi yang baik antara pihak yang berkolaborasi. Sedangkan pada penelitian ini, penulis menemukan kunci keberhasilan pelaksanaan kolaborasi yaitu dorongan dari pemimpin kepada para pegawainya dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan di Kota Palembang. Lalu, program pengentasan kemiskinan yang ada di Kota Palembang yang ditemukan oleh penulis berbeda dengan program pengentasan kemiskinan yang ada di Kabupaten Tuban. Pada penelitian Eko Budi (Eko Budi dkk, 2023) pelaksanaan kolaborasi dalam bentuk FGD, sedangkan di Kota Palembang dalam bentuk bantuan sosial secara tunai. Penelitian yang dilakukan Rutiana juga menemukan hambatan dalam proses kolaborasi yang diteliti yaitu kesulitan dalam menyamakan persepsi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat (Rutiana dkk, 2020). Sedangkan pada penelitian ini penulis menemukan hambatan berupa kurang memadainya sarana dan prasarana dalam melakukan pendataan kemiskinan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian ini yaitu dari setiap pemangku kepentingan saling bekerja sama untuk membantu keberhasilan dalam program Bantuan Pangan Non Tunai untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Palembang. Terdapat peraturan yang jelas untuk membantu keberhasilan program Bantuan Pangan Non Tunai untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Palembang yaitu Peraturan Presiden RI No 63 tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara tunai. Adanya proses manajemen yang baik untuk melaksanakan evaluasi berkala dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Palembang. Dilihat dari faktor pendukung dan faktor penghambat, terdapat dua faktor pendukung yaitu kerja sama setiap pemangku kepentingan dan dorongan dari pemimpin untuk membantu keberhasilan program Bantuan Pangan Non Tunai untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Palembang. Sedangkan, faktor penghambat ada dua juga yaitu Sarana Prasarana Yang Belum Memadai dan Pendataan yang belum dilaksanakan dengan maksimal untuk membantu keberhasilan program Bantuan Pangan Non Tunai untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Palembang.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kabupaten sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Ansell dan Gash.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap level pemerintahan yang lebih tinggi untuk menemukan hasil yang lebih mendalam dan meluas.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Sosial Kota Palembang dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palembang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Afif S., Dedi K., Ismunarta, & Rahmawati S. (2024). Collaborative Governance dalam Penanganan Kemacetan di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Media Birokrasi*. <https://doi.org/10.33701/jmb.v6i1.4151>
- Ansell dan Gash. 2008. *Collaborative Governance in Theory and Practice*, *Journal of Public Administration Research and Theory*. Volume; 543-571. https://www.researchgate.net/publication/31311629_Collaborative_Governance_in_Theory
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah 2022-2023. Diakses pada September 2023, dari <https://www.bps.go.id/indikator/23/192/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi.html>
- Budi Santoso dkk (2023), Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Tuban Melalui Integrasi Program Antar OPD. <https://journal.its.ac.id/index.php/sewagati/article/view/447>

- Creswell. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*, helen, London: SAGE Publications.
https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/510378/mod_resource/content/1/creswell.pdf
- Tielung, F., Nurdin, N., & Sri, N. (2023). COLLABORATIVE GOVERNANCE PENANGANAN BAGI KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI RUMAH AMAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 15(2), 250=264.
<https://doi.org/10.33701/jiapd.v15i2.3780>
- Leavy, Patricia. (2017). *Research Design Quantitative, Qualitative, Mixed Methods, Arts-Based, and Community-Based Participatory Research Approaches*. The Guilford Press.
https://www.researchgate.net/publication/327420021_Leavy_P_2017_Research_Design_Quantitative_Qualitative_Mixed_Methods_Arts-Based_and_Community-Based_Participatory_Research_Approaches_New_York_NY_The_Guilford_Press_ISBN_9781462514380_300_pp_Paperback
- Maulana, A., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(1), 220–229. <https://jbbe.lppmbinabangsa.id/index.php/jbbe/article/view/142>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mengenal Bantuan Pangan Non Tunai. Diakses pada Oktober 2023, dari <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10471>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/163102/permendagri-no-42-tahun-2010>
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/73010/perpres-no-63-tahun-2017>
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/129449/permensos-no-20-tahun-2019>
- Pratiwi, S. A., Noorsyarifa, G. C., & Apsari, N. C. (2022). Upaya Penanggulangan Kemiskinan Ekonomi di Indonesia Melalui Perspektif Pekerja Sosial. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 5(1), 72. <https://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/39965>
- Rahmah Yusrafitri dan Suci (2022), Sinergitas *Stakeholders* Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Masa Pandemi Covid-19). <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/6193>
- Rutiana Dwingseh, Sri Hastjarjo, dan Didik Gunawan Suharto (2020) Diseminasi Komponen *Collaborative Governance* Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Penanggulangan Kemiskinan). <https://jurnal.unpad.ac.id/dharmakarya/article/view/23749>
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*, hamzah, Bandung: Pustaka Ramadhan.

<https://eprints.unm.ac.id/14856/1/ANALISIS%20DATA%20KUALITATIF.pdf>

Salim Dan Syahrudin, (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Citapustaka Media.
<http://repository.uinsu.ac.id/552/>

Sugiyono, Prof. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Vol. 19). ALFABETA. <https://digilib.stekom.ac.id/ebook/view/METODE-PENELITIAN-KUANTITATIF-KUALITATIF-DAN-RND>

